

**PELAKSANAAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :
LIQA AULIA AMANDA
1910012111199**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg :541/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY
No.Reg :541/Pdt/02/II-2023

Nama : Liqa Aulia Amanda
Npm : 1910012111199
Judul tesis : Pelaksanaan Tender dalam Pengadaan Barang dan
Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG

Liqa Aulia Amanda¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : auliaalfakhri@gmail.com

ABSTRAK

Instructions for implementing tenders in the acquisition of goods and services can be found in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 about Government Procurement of Items and Services. The implementation the buying and selling of goods and services is regulated in Article 3 Paragraph (3). Problem formulation 1) How is utilizing tenders when purchasing products and services in the city of Padang's public works department? What challenges are there in using tenders every time you purchase goods and services at the public works office of Padang City? research of the social and legal variety. Primary and secondary data are the sources used. Both document analysis and interviewing are used as data collection strategies. The information is qualitatively examined. Research results: 1) Implemented in two ways, namely with providers and self-management 2) Obstacles - unstable internet network, lack of procurement personnel, and the inclusion of tender packages at the same time. Government efforts in enhancing accountability, transparency, and market access while creating healthy competition, enhancing the procurement process's effectiveness, supporting the supervision process and meeting the need for access to information.

Keywords : Implementation, Item, Services, Tender

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Panduan terkait penyelenggaraan penyediaan produk ini telah di atur didalam Perpres RI No. 12 Th. 2021 yang memuat aturan terkait Perubahan Atas Perpres No. 16 Th. 2018 mengenai logistik Barang/Jasa Pemerintah. Pasokan barang beserta jasa ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) yang dilakukan dengan cara berikut :

1. Pengadaan barang melalui pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa. Terkait hal ini dapat berbentuk badan usaha ataupun perseorangan yang kegiatan usahanya dapat berupa menyediakan barang atau memberikan pelayanan jasa. memberikan pelayanan jasa.

2. dan dengan cara swakelola yaitu dengan memperoleh barang atau jasa yang dilakukan sendiri oleh kementerian ataupun lembaga ataupun perangkat daerah, kementerian ataupun lembaga ataupun perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, ataupun kelompok masyarakat.

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui elektronik bisa memberikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, memperluas akses pasar serta menciptakan persaingan yang sehat, membuat proses pengadaan menjadi lebih efisien, menjadi pendukung proses kontrol serta audit, serta menjawab kebutuhan akan informasi up to date untuk mendorong kebersihan dan kesejahteraan. menjamin

untuk mengelola akuisisi, mengelola barang atau jasa pemerintah.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tender dalam Suplai Barang dan Jasa di DPU Kota Padang?
2. Apakah Hambatan – Hambatan yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Tender dalam Suplai Barang dan Jasa di DPU Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuannya ialah guna mengetahui:

1. Pelaksanaan Tender dalam Suplai Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
2. Hambatan – hambatan yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Tender dalam Suplai Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang peeliti gunakan berjenis yuridis sosiologis (*socio legal research*) atau istilah lainnya yang di gunakan ialah penelitian lapangan.

Data primer ialah data yang di dapatkan langsung dari sumber penelitian, atau bisa juga disebut sebagai data yang dilakukan langsung kelapangan.

Data sekunder, yakni data akan didapatkan dengan mempelajari bahan pustaka yang meliputi berkas resmi, buku, hasil penelitian seperti laporan, makalah ataupun artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN TENDER DALAM SUPLAI BARANG DAN JASA DI DPU KOTA PADANG

Berdasar pada hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bersama Bapak Zul Helmi, selaku Kasubag bidang Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Padang, tahapan – tahapan yang dilalukan dalam proses pelaksanaan tender yang dilakukan oleh DPU ke pada BPBJ ialah: PA/KPA/PPK menyampaikan surat pengajuan paket yang akan ditender/ seleksi kepada BPBJ berserta kelengkapan dokumen lainnya (daftar kelengkapan dokumen tender terlampir) pelaksanaan ini dilakukan pada paket tender yang bernilai Rp. 200.000.000 ke atas.

1. Pelaksanaan Pemilihan melalui Penyedia, Kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi penyedia yaitu :
 - a. Surat Penawaran (HPS) yang sesuai di *platform* LPSE,
 - b. Jaminan Penawaran
 - c. Kelengkapan Akta Perusahaan
 - d. Surat Bahan Usaha (SBU)
 - e. Daftar Peralatan Utama yang dimiliki Perusahaan
 - f. Daftar Personel Manajerial
 - g. Formulir Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK),
 - h. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan)
 - i. Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan Khusus bila terdapat Evaluasi Kewajaran Harga dibawah 80% HPS
2. Pelaksanaan Swakelola

Tipe Swakelola	Penyelenggara Swakelola
Tipe 1	Dilaksanakan oleh instansi yang memiliki kegiatan, yang pengerjaan fisiknya dari awal

	sampai akhir di lakukan oleh instasi yang memiliki kegiatan.
Tipe 2	Pelaksanaan perencanaannya dilakukan oleh instasi yang mempunyai kegiatan, dan pelaksanaan fisik kerjakan oleh instasi pemerintah lain.
Tipe 3	Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat
Tipe 4	Dilaksanakan oleh organisasi masyarakat (Ormas)

B. HAMBATAN – HAMBATAN YANG DI HADAPI DALAM PELAKSANAAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DPU KOTA PADANG

Terkait dengan relevansi hambatan yang dihadapi ketika menyelenggarakan suplai produk di DPU Kota Padang, adapun Hasil wawancara sebagai berikut:

Hambatan - hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tender diantaranya ialah kendala jaringan internet yang mengakibatkan lambatnya jaringan internet yang menyebabkan keterlambatan untuk upload informasi tentang tender dan kegagalan dalam upload yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tender pada penggunaan platfrom LPSE, paket tender masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga terjadi perlambatan kerja yang berakibat pada keterlambatan informasi pada paket yang akan di tayangkan di platfrom LPSE, dan terbatasnya personil kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni/atau yang sanggup mengelola sistem secara elektronik, sehingga pelaksanaannya kurang opimal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pemaparan mengenai penyelenggaraan suplai barang dan jasa di DPU Padang, suplai barang ataupun jasa yang dilaksanakan dengan sesuai dua cara yaitu dengan penyedia dan swakelola, pelaksanaan ini juga lebih efesien yang dapat memberikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, peningkatan akses pasar sekaligus menciptakan kompetisi sistem sehat, meningkatkan efisiensi proses penawaran pengadaan, mendukung proses kontrol dan pemantauan serta meningkatkan kebutuhan akan akses informasi dengan menggunakan *platfrom* LPSE.

Hambatan – Hambatan yang terjadi ketika melaksanakan tender pengadaan barang maupun jasa antara lain jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya personil pengadaan barang dan jasa, dan masuknya peket tender dalam waktu yang bersamaan sehingga kurang efektif dalam pemerikasannya.

Selaras dengan hal tersebut terdapat saran antara lain, Diadakannya sosialisasi mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa selain berguna bagi instasi yang mengadakan barang dan jasa dapat berguna juga bagi penyedia untuk menjadi pedoman dalam mengikuti tender.

Kurangnya personel perlu diperhatikan, karena kekurangan personel ini merupakan masalah utama ketika suplai produk publik. Hal tersebut dapat diatasi dengan mendatangkan personel yang tidak bersertifikat untuk mengikuti pelatihan suplai produk atau dengan mengirimkan personel untuk mengikuti ujian dalam bidang suplai produk. Kekurangan personel bisa diselesaikan lewat sinergi dengan instansi pemerintah atau dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, tentunya dengan mtembuat jadwal tender yang lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ervianto Wulfram I, 2005, Manajemen Proyek Kontruksi, Andi, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Sumber Lain

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020, Tugas dan Fungsi PUPR, pu.go.id, 07 oktober 2022, <https://pu.go.id/page/Tugas-dan-Fungsi>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan pada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. dosen yang membimbing peneliti dan telah meluangkan waktunya serta bimbingannya agar karya ini terselesaikan dengan baik dan ucapan terimakasih pada pihak yang sudah menolong peneliti mengerjakan skripsi ini.